

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan suatu wilayah akan terwujud sesuai dengan cita-cita pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terdapat suatu permasalahan yang akan menghambat suatu pembangunan. Sedangkan adanya kesenjangan yang semakin berkembang dan meluas di Indonesia saat ini masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan regional dan daerah yang belum dapat diselesaikan secara baik. Salah satu indikatornya adalah adanya kesenjangan wilayah dan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun, oleh karena itu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya harus dinikmati seluruh penduduk secara merata, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat dinikmati penduduk jika pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi (Suseno, 1990).

Tujuan pembangunan di Indonesia yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat

kesenjangan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dalam masyarakat tetapi bisa saja sebagian besar penduduknya belum berkecukupan. Sebagian kecil masyarakat mempunyai lebih banyak akses untuk menikmati pertumbuhan ekonomi dari pada sebagian besar masyarakat lainnya (Yoenanto, 2007). Hal tersebut merupakan salah satu pemicu adanya ketimpangan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, sedangkan tujuan pembangunan ekonomi lainnya yakni dapat mengatasi masalah kemiskinan dan mengatasi masalah-masalah sosial lainnya.

Masalah ketimpangan tidak hanya terjadi antara pulau saja yang telah banyak dikatakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mengemukakan bahwa terjadinya ketidakseimbangan antara Jawa dengan pulau-pulau lainnya atau antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), melainkan ketimpangan juga sering terjadi secara nyata antara daerah kabupaten bahkan antara kecamatan. Perbedaan besarnya PDRB per kapita pada wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta memperlihatkan bahwa pada wilayah tersebut terjadi kesenjangan sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi pada satu wilayah saja. Ketidakmerataan tingkat PDRB per kapita Provinsi D.I.Yogyakarta dimana PDRB per kapita merupakan indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh dengan maksimal dan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sampai dengan tahun 1998 PDRB baru dihitung sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Sementara itu, ada tuntutan yang semakin kuat baik dari pemerintah, para akademisi maupun peneliti terhadap angka PDRB agar cakupannya sampai dengan tingkat yang lebih kecil, yaitu tingkat kecamatan. Adanya program kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi semakin menempatkan angka-angka PDRB tingkat kecamatan menjadi sangat penting untuk dihitung. Indikator tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut didistribusikan dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi tetapi seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya (BPS, 2008).

Hasil kajian menunjukkan, bahwa perekonomian D.I.Yogyakarta selama lima tahun terakhir terus berkembang. PDRB Provinsi D.I.Yogyakarta atas dasar harga berlaku tahun 2008 mencapai Rp 38,10 Triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 19,21 Triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen terhadap kondisi 2007. Apabila dilihat dari PDRB per kapita pada tahun 2008 telah mencapai Rp 10,99 juta per tahun atau naik 114,64 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi D.I.Yogyakarta masih bertumpu pada sektor andalan yaitu Jasa-jasa, Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan andil pertumbuhan sekitar 1,18 persen terhadap

pertumbuhan total sebesar 5,02 persen. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, perekonomian Provinsi D. I. Yogyakarta terutama didukung oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (BPS, 2008).

Beberapa penelitian membuktikan bahwa, Disparitas (ketimpangan) wilayah di Indonesia diawali oleh Hendra Esmara (1975) yang mengukur kesenjangan ekonomi antar daerah. Berdasar data dari tahun 1950 hingga 1960, ia menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan kategori kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor non migas diabaikan. Nasjid Majidi (1997) dengan menggunakan data PDRB riil dikemukakan bahwa selama periode 1968-1997 indeks ketimpangan pendapatan antar daerah semakin meningkat. DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, dan Riau merupakan provinsi yang paling makmur, sedangkan provinsi terparah yaitu, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Bengkulu dan Jambi merupakan wilayah/ daerah yang kurang maju. Secara umum provinsi-provinsi di daerah timur Indonesia menempati posisi rendah (Kuncoro, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Diah (2006) yang mengemukakan besarnya tingkat PDRB Per Kapita dan karakteristik regional *human capital* (faktor pendidikan), yaitu persentase pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan per provinsi (SMU) dan persentase jumlah angkatan kerja per provinsi yang semakin meningkat akan mampu memperlihatkan penurunan kesenjangan ekonomi antar provinsi.

Lall dan Yilmaz (2000) dalam Diah. *Stocks of public dan human capital* menjadi faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi regional. Infrastruktur yang tepat dan efisien merupakan aturan yang melekat dalam mendorong kemampuan akses ke dalam pasar, kemampuan mengurangi biaya produksi dan menghasilkan surplus konsumen dengan mengurangi biaya pengeluaran untuk konsumsi, mendorong kualitas hidup yang lebih baik, sehingga dapat menarik investor. Penyebaran infrastruktur *Stocks of public dan human capital*, memiliki dampak penting dalam perubahan disparitas regional.

Tabel 1.1  
 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D.I.Yogyakarta  
 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha  
 Tahun 2003-2008 (Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/ Kota	2003	2004	2005	2006	2007	2008 <sup>*)</sup>
1	Kulon Progo	1.338.700	1.398.744	1.465.477	1.524.848	1.587.630	1.662.370
2	Bantul	2.932.377	3.080.312	3.234.173	3.299.646	3.448.949	3.618.060
3	Gunung Kidul	2.526.516	2.613.238	2.726.389	2.830.583	2.941.288	3.070.298
4	Sleman	4.596.227	4.837.376	5.080.564	5.309.059	5.553.580	5.838.46
5	Kota Yogyakarta	3.993.837	4.195.392	4.397.849	4.572.504	4.776.401	5.021.149
<b>6</b>	<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>15.360.409</b>	<b>16.146.424</b>	<b>16.910.877</b>	<b>17.535.749</b>	<b>18.291.512</b>	<b>19.208.938</b>

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta. Analisis PDRB Provinsi D.I.Yogyakarta, beberapa terbitan.

\*Angka sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa terdapat perbedaan PDRB tiap Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi D.I.Yogyakarta. Selama periode tersebut, terlihat adanya kesenjangan antar wilayah Kabupaten/Kota, walaupun beberapa daerah telah mengalami pergeseran. Kabupaten Sleman merupakan daerah maju dan cepat tumbuh sepanjang periode, sehingga berpotensi untuk tumbuh terus dalam jangka panjang. Kemudian Kota Yogyakarta mengalami pergeseran dari daerah maju tetapi

tertekan menjadi daerah maju dan cepat tumbuh. Sedangkan ketiga kabupaten lainnya yakni kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulonprogo masih termasuk kategori daerah tertinggal sepanjang periode. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki sektor Perdagangan, Hotel dan Jasa sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi D.I.Yogyakarta, sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo sektor pertanian adalah penyumbang utama dalam pencipta PDRB Provinsi D.I.Yogyakarta. Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan nilai PDRB antar Kabupaten/Kota sangat tergantung pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia.

Ada tiga macam ukuran pertumbuhan yang biasa digunakan untuk mengkaji disparitas regional, yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan sebagai indikator untuk melihat pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas), sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi. Ukuran yang akan digunakan biasanya tergantung dari tujuan analisis atau penelitian tersebut (Ardito, 2003). Penelitian ini akan menggunakan pertumbuhan output per kapita untuk melihat seberapa besar tingkat

kesejahteraan masyarakat yang telah mampu dihasilkan oleh suatu wilayah atas apa yang telah mampu dikeluarkan untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi.

Karena pentingnya akan masalah pertumbuhan ekonomi dalam hal pemerataan pendapatan per kapita yang akan mengurangi disparitas/ketimpangan Provinsi D.I.Yogyakarta dalam pembangunan ekonomi maka penulis mengambil judul skripsi: “***ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2003-2008***”

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti hanya dibatasi mengenai disparitas regional Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2003-2008 dengan beberapa indikator antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tiap Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, jumlah penduduk per Kabupaten/Kota Provinsi D.I.Yogyakarta.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan Kabupaten/Kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Provinsi D.I.Yogyakarta.

2. Menghitung ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penyusunan Analisis Disparitas Regional Provinsi D.I.Yogyakarta ini antara lain untuk:

1. Untuk mengklasifikasikan Kabupaten/Kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Provinsi D.I.Yogyakarta.
2. Untuk menghitung ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.

#### **E. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam Penyusunan Analisis Disparitas Regional Provinsi D.I.Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktik, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terutama mengenai masalah disparitas atau ketimpangan.
2. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama berkaitan dengan masalah disparitas atau ketimpangan, khususnya dalam hal pengukuran dan pengidentifikasian karakteristik faktor penyebab terjadinya disparitas atau ketimpangan sebagai salah satu penyebab terjadinya masalah ekonomi dan penghambat pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I.Yogyakarta.